

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Rasio Keuangan Daerah Tahun 2020–2024

Margareta Lolu

Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Lontar Rote

Email: m4rl0sumb4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao selama periode 2020–2024 dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode analisis meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi belanja daerah, serta rasio keserasian belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao masih berada pada kategori rendah dan sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Meskipun demikian, efektivitas PAD menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan pada dua tahun terakhir. Dari sisi belanja, pengelolaan keuangan daerah relatif efisien, namun struktur belanja masih didominasi oleh belanja operasional sehingga ruang fiskal untuk pembangunan jangka panjang masih terbatas.

Kata kunci: kinerja keuangan daerah, APBD, rasio keuangan, PAD.

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of Rote Ndao Regency during the 2020–2024 period using regional financial ratios. Secondary data were obtained from regional budget realization reports. The analysis employs financial independence, local revenue effectiveness, expenditure efficiency, and expenditure harmony ratios. The findings indicate low fiscal independence with high dependency on central government transfers. However, local revenue effectiveness shows an improving trend, while expenditure management is relatively efficient although still dominated by operational spending.

Keywords: regional financial performance, budget, financial ratios.

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah bukan sekedar sebuah kebijakan administratif, tetapi juga sebuah paradigma baru dalam pemerintahan yang memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan otonomi ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menciptakan kesejahteraan dan mengelola sumber daya yang ada. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu aspek yang paling krusial, karena keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri, efektif, dan efisien.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan anggaran, pengumpulan pendapatan, hingga pengeluaran untuk berbagai program dan kegiatan yang mendukung pembangunan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mampu merumuskan anggaran yang tidak hanya

mencerminkan kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperhatikan potensi pendapatan yang dapat dikumpulkan.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tidaklah sedikit. Banyak daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi dalam mencari sumber pendapatan baru. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata, yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD. Misalnya, daerah yang memiliki keindahan alam atau budaya yang unik dapat menarik wisatawan, sehingga memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal.

Analisis kinerja keuangan daerah menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi fiskalnya. Kinerja keuangan dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti rasio kemandirian fiskal, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengumpulan pendapatan. Rasio kemandirian fiskal, misalnya, menunjukkan seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai belanjanya sendiri tanpa bergantung pada transfer dari

pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio keamndirian, semakin mandiri suatu daerah dalam pengelolaan keuangannya.

Selain itu, efisiensi pengeluaran juga merupakan indikator yang penting. Pemerintah daerah harus mampu menggunakan anggaran yang ada secara optimal, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan tidak hanya tepat waktu, tetapi juga sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Hal ini akan membantu daerah dalam mencegah pemborosan anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sedangkan dalam hal efektivitas pengumpulan pendapatan, pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi pendapatan yang ada dan mengoptimalkannya. Seperti halnya, pengelolaan pajak daerah yang baik dapat meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan juga sangat penting. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik.

Kabupaten Rote Ndao, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu daerah kepulauan yang memiliki karakteristik unik dan beragam. Geografisnya yang terpisah dari pulau-pulau besar lainnya di Indonesia memberikan tantangan tersendiri dalam pengembangan ekonomi dan infrastruktur. Dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar, Rote Ndao dikelilingi oleh lautan yang kaya akan sumber daya alam, namun potensi tersebut sering kali tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, dan aksesibilitas yang terbatas.

Salah satu karakteristik utama yang membedakan Kabupaten Rote Ndao dari daerah lain adalah keterbatasan sumber daya ekonomi yang tersedia. Meskipun Kabupaten Rote Ndao memiliki potensi dalam sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata, pengembangan sektor-sektor ini masih terhambat. Seperti halnya, sektor perikanan yang seharusnya dapat menjadi andalan Kabupaten Rote Ndao sering kali terhalang oleh kurangnya fasilitas pengolahan hasil laut yang memadai. Banyak nelayan yang masih menggunakan metode tradisional dalam menangkap ikan, sehingga hasil tangkapan mereka tidak dapat bersaing dengan produk dari daerah lain yang lebih maju. Selain itu, kurangnya

pelatihan dan pendidikan bagi para nelayan juga menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan.

Pada sektor pertanian, meskipun Rote Ndao memiliki tanah yang subur dan iklim yang mendukung, produktivitas pertanian masih rendah. Banyak petani yang belum mengadopsi teknologi pertanian modern, sehingga hasil panen mereka tidak optimal. Seperti halnya, penggunaan pupuk yang tidak tepat dan metode bercocok tanam yang kurang efisien menyebabkan banyak lahan pertanian yang tidak berhasil atau hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Padahal, jika dikelola dengan baik, sektor pertanian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu isu krusial yang dihadapi oleh Kabupaten Rote Ndao. Dengan kontribusi PAD yang rendah, Kabupaten Rote Ndao sangat bergantung pada alokasi dana dari pusat untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Hal ini menciptakan situasi di mana pemerintah daerah tidak memiliki fleksibilitas fiskal yang cukup untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan efektif.

Melihat semua tantangan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, diharapkan mereka dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas di sektor-sektor unggulan.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu berinvestasi dalam infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah. Dengan infrastruktur yang baik, diharapkan dapat menarik investasi dan pengembangan sektor pariwisata yang lebih baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai kinerja keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao selama periode 2020–2024. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih berorientasi pada peningkatan kemandirian dan pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi kinerja keuangan daerah berdasarkan data numerik yang tersedia tanpa melakukan pengujian hipotesis. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2020–2024.

Teknik analisis data dilakukan dengan menghitung rasio keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja daerah, serta rasio keserasian belanja. Hasil perhitungan rasio kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menilai kinerja keuangan daerah dari tahun ke tahun.

PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer (Pusat/Provinsi)}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah mampu mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung pada sumber pendanaan dari luar, seperti dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian dihitung dengan membandingkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin besar kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri, yang pada akhirnya mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik.

Tabel 1 Hasil Perhitungan
Rasio Kemandirian Daerah

Tahun	PAD (M)	Pendapatan (M)	Rasio (%)	Kategori
2020	32.68	753.65	4.34	Instruktif
2021	31.51	747.54	4.22	Instruktif
2022	24.19	800.7	3.02	Instruktif
2023	32.18	841.14	3.83	Instruktif
2024	40.04	869.32	4.6	Instruktif

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Kabupaten Rote Ndao selama periode penelitian berada pada kategori instruktif. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah pusat masih sangat dominan dalam pembiayaan daerah. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan perlunya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting dalam pengelolaan keuangan suatu wilayah. Rasio kemandirian keuangan yang rendah menunjukkan ketergantungan daerah terhadap dana yang dialokasikan oleh

pemerintah pusat. Dalam hal ini Kabupaten Rote Ndao, dalam situasi saat ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai otonomi yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya kemandirian keuangan Kabupaten Rote Ndao adalah keterbatasan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang belum sepenuhnya tergali. Misalnya, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten Rote Ndao masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari infrastruktur yang kurang memadai hingga akses pasar yang terbatas. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu merumuskan strategi yang lebih inovatif untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta menciptakan nilai tambah bagi produk lokal.

Contoh konkret dari upaya intensifikasi sumber pendapatan daerah dapat dilihat dari pengembangan sektor pariwisata. Rote Ndao memiliki keindahan alam yang luar biasa, seperti pantai-pantai yang menawan dan budaya lokal yang kaya. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan melakukan promosi yang lebih intens dan membangun infrastruktur pendukung, seperti akomodasi dan aksesibilitas, Kabupaten Rote Ndao dapat menarik lebih

banyak wisatawan, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan PAD.

Selain itu, ekstensifikasi sumber pendapatan daerah juga perlu diperhatikan. Pemerintah daerah harus berupaya untuk menciptakan peluang baru dalam sektor ekonomi. Misalnya, pengembangan industri kreatif dan kerajinan tangan yang memanfaatkan sumber daya lokal dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan PAD. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses produksi, tidak hanya pendapatan daerah yang meningkat, tetapi juga lapangan kerja baru dapat tercipta, yang berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya ini tidak dapat diabaikan. Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengembangan program-program yang berkaitan dengan peningkatan PAD. Dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga program yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Analisis mendalam tentang rasio kemandirian keuangan Kabupaten Rote Ndao menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Kebiasaan masyarakat

dalam mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat harus diubah. Kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi perlu ditanamkan sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun informal.

Rasio kemandirian keuangan Kabupaten Rote Ndao yang berada pada kategori instruktif menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah menjadi kunci utama dalam mencapai kemandirian keuangan yang lebih baik. Melalui pengembangan sektor-sektor potensial, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan Kabupaten Rote Ndao dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Upaya ini memerlukan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, namun hasilnya akan sangat berharga bagi masa depan daerah dan masyarakat.

Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD.

Tabel 2 Hasil Perhitungan
Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio (%)	Kriteria
2020	31.17	32.68	104.85	Sangat Efektif
2021	32.27	31.51	97.64	Efektif
2022	27.19	24.19	88.96	Cukup Efektif
2023	28.6	32.18	112.52	Sangat Efektif
2024	33.09	40.04	120.99	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rote Ndao menunjukkan fluktuasi yang signifikan, tetapi cenderung meningkat pada akhir periode penelitian. Pencapaian rasio di atas 100 persen pada tahun 2023 dan 2024 mencerminkan adanya perbaikan kinerja dalam pemungutan PAD, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pengelolaan retribusi daerah.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas PAD adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

Misalnya, melalui sosialisasi edukasi pada berbagai lapisan masyarakat, pemerintah berhasil menjangkau lebih banyak wajib pajak. Sosialisasi tersebut tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran akan manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Dengan meningkatnya kepatuhan, jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya pun bertambah, sehingga berkontribusi pada peningkatan PAD.

Selain itu, optimalisasi pengelolaan retribusi daerah juga memainkan peran penting dalam peningkatan efektivitas PAD. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah melakukan reformasi dalam sistem pengelolaan retribusi, dengan memperkenalkan teknologi informasi seperti sistem pembayaran online yang mempermudah proses pemungutan. Masyarakat dapat lebih mudah melakukan pembayaran retribusi tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi wajib pajak, tetapi juga mengurangi potensi kebocoran pendapatan yang sering terjadi dalam sistem manual. Dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga meningkat, yang pada akhirnya mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Efektivitas PAD Kabupaten Rote Ndao menunjukkan tren yang positif,

dengan pencapaian rasio di atas 100 persen pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pengelolaan retribusi daerah. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal ketidakmerataan pemungutan pajak dan perlunya transparansi dalam penggunaan anggaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, diharapkan peningkatan PAD dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang ada, agar efektivitas PAD dapat dipertahankan dan ditingkatkan lebih lanjut.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi keuangan daerah digunakan untuk menilai perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Rasio di bawah 100 persen menunjukkan pengelolaan keuangan yang efisien.

**Tabel 3 Hasil Perhitungan
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Tahun	Belanja	Pendapatan	Rasio (%)	Kriteria
2020	744.03	753.65	98.72	Efisien
2021	751.45	747.54	100.52	Kurang Efisien
2022	813.43	800.7	101.59	Kurang Efisien
2023	786.32	841.14	93.49	Efisien
2024	867.6	869.32	99.8	Efisien

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah relatif efisien, meskipun terdapat beberapa tahun dengan rasio di atas 100 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengendalian belanja yang lebih ketat agar tidak melebihi kemampuan pendapatan daerah. Dalam hal ini, penting untuk memahami lebih dalam mengenai pengelolaan belanja daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensinya, serta implikasi dari rasio belanja yang tinggi terhadap keuangan daerah.

Salah satu indikator efisiensi pengelolaan belanja daerah adalah rasio belanja terhadap pendapatan. Rasio belanja memberikan gambaran seberapa besar belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Jika rasio belanja berada di bawah 100 persen, artinya daerah tersebut mampu mengelola belanjanya dengan baik, sesuai dengan kemampuan pendapatan yang ada.

Namun, ketika rasio belanja melebihi 100 persen, hal ini menandakan bahwa belanja daerah telah melebihi pendapatan, yang dapat berpotensi menimbulkan masalah keuangan di masa depan.

Rasio Keserasian Belanja

1) Rasio Belanja Operasi

Menggambarkan porsi belanja rutin untuk menjalankan pemerintahan.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Belanja Modal

Menggambarkan porsi belanja untuk pembangunan dan investasi daerah.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio keserasian belanja digunakan untuk melihat proporsi antara belanja operasional dan belanja modal. Struktur belanja yang ideal diharapkan dapat mendorong pembangunan jangka panjang melalui peningkatan belanja modal.

**Tabel 4 Hasil Perhitungan
Rasio Keserasian Belanja**

Tahun	Belanja Operasional (%)	Belanja Modal (%)
2020	82.83	17.17
2021	85.93	14.07
2022	80.79	19.21
2023	79.05	20.95
2024	85.47	14.53

Hasil analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa belanja operasional masih mendominasi struktur belanja daerah. Dalam hal ini, belanja operasional merujuk pada pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan dan pelayanan publik, seperti gaji pegawai, biaya administrasi, dan pengeluaran rutin lainnya. Di sisi lain, proporsi untuk belanja modal sangat rendah sehingga berpotensi menghambat percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketika belanja operasional mendominasi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih fokus pada pengeluaran jangka pendek yang bersifat konsumtif daripada investasi jangka panjang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika sebuah daerah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk gaji pegawai dan biaya operasional lainnya, maka dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, menjadi terbatas. Ini berpotensi menghambat percepatan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat.

Selain itu, rendahnya proporsi belanja modal juga dapat berdampak

negatif terhadap daya saing daerah. Dalam era globalisasi, daerah yang memiliki infrastruktur yang baik akan lebih mudah bersaing dengan daerah lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai contoh, daerah yang memiliki akses jalan yang baik akan lebih mudah dalam mendistribusikan barang dan jasa, sehingga dapat menarik lebih banyak pelaku usaha. Sebaliknya, daerah yang terhambat oleh infrastruktur yang buruk akan kesulitan dalam menarik investasi dan mengembangkan perekonomian lokal.

Transisi dari belanja operasional yang dominan menuju peningkatan belanja modal memerlukan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat. Pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi prioritas pembangunan yang mendesak dan merumuskan kebijakan yang mendukung alokasi anggaran yang lebih seimbang. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada, untuk menentukan apakah pengeluaran tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Rote Ndao selama periode 2020–2024 masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. Meskipun demikian, efektivitas PAD menunjukkan tren peningkatan yang positif pada dua tahun terakhir. Pengelolaan belanja daerah relatif efisien, namun struktur belanja masih didominasi oleh belanja operasional.

Kinerja keuangan Kabupaten Rote Ndao selama periode 2020-2024 menunjukkan tantangan dan peluang yang perlu dikelola dengan baik. Meskipun tingkat kemandirian fiskal masih rendah dan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat tinggi, ada indikasi positif dari peningkatan efektivitas PAD. Pengelolaan belanja daerah yang efisien perlu diimbangi dengan pengurangan belanja operasional agar lebih banyak sumber daya yang dapat dialokasikan untuk pembangunan yang produktif. Dengan memanfaatkan potensi sektor pariwisata dan pertanian, serta melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, Kabupaten Rote Ndao memiliki peluang untuk meningkatkan kemandirian

fiskalnya dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

pemerintah Kabupaten Rote Ndao memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. Dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi, menggali potensi sumber daya alam, serta meningkatkan belanja modal, pembangunan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan yang terencana dan terintegrasi, Rote Ndao dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang *pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah*.

Undang-Undang Provinsi No. 23 Tahun 2014 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Kabupaten Rote Ndao.

Digdowiseiso, K., Pujiyono, F. A., & Santoso, I. D. (2024). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018–2022*. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 4(5), 5929–5938.

Juliansyah, E., & Insaniyah, M. (2023). *Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan*. Digital Economic, Management and Accounting Knowledge Development, 5(1), 1–16

Marlina, C. (2023). *Analisis kinerja APBD Provinsi di Indonesia berdasarkan enam rasio keuangan*. Dinamika: Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan

Irnawati, I. (2023). *Analisis kinerja keuangan daerah dengan rasio kemandirian, efektivitas, dan pertumbuhan*. Jurnal Manajemen, Manajemen, dan Ilmu Ekonomi (JMMNI). Mahendra, A., Faridah, F., & Oktarida, A. (2022). *Analisis Rasio Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Palembang Tahun 2016–2020*. Jurnal Syntax Admiration, 3(8), 952–972